

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT .Raja Grafindo Persada, Jakarta ,2003.

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Bohari, *Pengantar Hukum Pajak* , PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta ,2001.

Darwin, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, edisi.1, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010.

Eddy Faisal, *Memahami Amnesti Pajak dengan Cerdas dan Lengkap*, PT .Buku Pintar Indonesia, Jakarta, 2016.

Effendi Perangin, *Hukum Agraria Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Fidel, *Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*, Jakarta: Murai Kencana, 2010

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., Amerika Serikat 1978.

H.M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan, *Perpajakan untuk Praktisi dan Akademisi*, Empatdua Media, Malang , 2015.

JJ. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu – Ilmu Sosial, Asas – Asas*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta ,1996.

M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* , Mandar Maju, Bandung ,1994.

Marihot Pahala Siahaan, *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Teori dan Praktek*, Jakarta, Raja Grafindo, 2002.

M. Djafar Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Andi Yogyakarta, Jakarta, 2011.

Mustofa, *Tuntutan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, Yogyakarta, Karya Media, 2010

Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B. Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum : Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Buku 1, Bandung ,2006.

Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, *Tax Amnesty itu mudah (Simulasi dan Praktik Pengampunan Pajak*, Jakarta, Visimedia, 2016.

Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*,PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta ,2008.

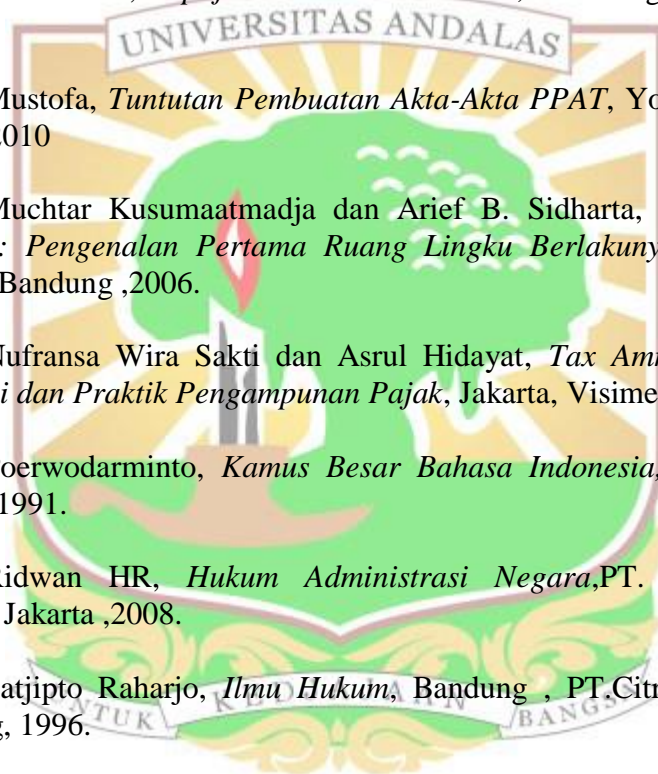
Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung , PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta,1995.

Soerjono SoeKanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers,Jakarta, 2009.

Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi Yogyakarta, 2009



Zainal Muttaqin, *Tax Amnesty di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2013.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta , 2009.

B. PERATURAN PERUNDANG –UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria.

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 Tentang Pengampunan Pajak.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang –Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Instrument Investasi Di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 658/KMK.03/2016 Tentang Penetapan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak sebagai Tempat Tertentu Untuk Tempat Penyampaian Surat Pernyataan Harta Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

C. WEBSITE

<http://pekanbarukota.bps.go.id/index.php?hal=tabel&id=18> di unggah pada tanggal 12 maret 2017 pukul 21.10

<http://www.bi.go.id/> "Kajian Ekonomi Regional Provinsi Riau Triwulan I 2010" (PDF). Bank Indonesia Pekanbaru di unggah pada tanggal 12 maret 2017 pukul 21.30

<http://finansial.bisnis.com/read/20170104/10/616632/peserta-tax-amnesty-riau-kepri-capai-30.444-wajib-pajak> di unggah pada tanggal 4 April 2017 pukul 15.07 wib

<http://www.pajak.go.id/content/amnesti-pajak> di unggah pada tanggal 27 Mei 2017 pukul 15.00 wib

<http://www.pajak.go.id/faq-amnesti/objek-amnesti-pajak-harta-dan-utang> diakses pada tanggal 28 Mei pukul 15.20 wib

